



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3791>

COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA SAMBIRATA, KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA KAPULAGA)

Sri Rotul Marfuah¹, Suryoto*, Oti Kusumaningsih³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto^{1,2,3}

sridek885@gmail.com¹, suryotofisip@gmail.com², oti.kusumaningsih.msi@gmail.com³

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 28 April 2023

Revised date: 16 Mei 2023

Accepted date: 02 April 2023

ABSTRACT

At the end of 2019 to 2021 the Covid-19 pandemic has stopped several marketing supply chains that are usually carried out by farmers. One of them is Sambirata Village, Cilongok District, where the majority of the population work as farmers. It is the impact of Covid'19 that has given rise to several other problems including: cardamom production is increasing but sales prices are decreasing, cardamom residues are still not managed properly and seriously, village-owned enterprises cannot become economic institutions in terms of capital and marketing, apart from that they have not been able to partner with other agencies to help increase the sale and purchase of cardamom. This study aims to explain and describe how Collaborative Governance in Sambirata Village, Cilongok District, Banyumas Regency in increasing Community Economic Empowerment through Cardamom Cultivation. The method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Collaborative Governance in Sambirata Village, Cilongok District, Banyumas Regency (a study of community economic empowerment through cardamom cultivation), has not been maximized, but so far the efforts made by the Village Government and Private Government (PT.Sido Muncul) have been sufficient good for helping in efforts to empower the community's economy, both in terms of increasing human resource capacity, as well as the limited facilities and infrastructure. The role of the Department of Agriculture and Food Security of Banyumas Regency in distributing free fertilizer assistance to cardamom and DOM farmers has been carried out, as well as some assistance from PT.Sido Muncul and BRI Bank which provided assistance with cardamom dryers, then reduced fertilizer distribution and there were still many people who Human resources are still lacking in managing cardamom cultivation.

Keywords: collaborative governance, community empowerment, cardamom cultivation.

ABSTRAKSI

Diakhir tahun 2019 hingga 2021 Pandemi covid-19 telah memberhentikan beberapa rantai pasok pemasaran yang biasanya dilakukan para petani. Salah satunya Desa Sambirata Kecamatan Cilongok, dimana penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dari dampak Covid'19 itulah yang memunculkan beberapa permasalahan yang lain diantaranya: hasil produksi kapulaga semakin meningkat namun harga penjualan justru semakin menurun, mengenai residu kapulaga masih belum dikelola dengan baik dan serius, Badan Usaha Milik Desa belum bisa menjadi instansi ekonomi dalam hal permodalan dan pemasaran, selain itu belum bisa menggandeng instansi lain untuk membantu meningkatkan jual beli kapulaga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang bagaimana Collaborative Governance di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Budidaya Kapulaga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Collaborative Governance di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (studi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya kapulaga), belum maksimal namun sejauh ini ada upaya yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Swasta (PT.Sidomuncul) sudah cukup baik untuk membantu dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik dari segi peningkatan kapasitas SDM, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana. Peranan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam penyaluran bantuan pupuk gratis untuk petani kapulaga dan DOM sudah terlaksana, serta beberapa bantuan dari PT.Sidomuncul dan Pihak Bank BRI yang memberikan bantuan alat pengering kapulaga, kemudian kurangnya pupuk yang di bagikan serta masi banyak masyarakat yang masih kurang akan SDM dalam mengelola budidaya kapulaga.

Kata Kunci : collaborative governance, pemberdayaan masyarakat, budidaya kapulaga

PENDAHULUAN

Diakhir tahun 2019 hingga 2021 Covid-19 melanda Indonesia, banyak sektor ekonomi yang mengalami kebuntuan masalah ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah sektor ekonomi masyarakat. Pada umumnya pemutusan hubungan kerja (PHK), Mundurnya distribusi dan pemasaran hasil produksi baik di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi salah satu dampak dari covid-19. Pandemic covid-19 telah memberhentikan beberapa rantai pasok pemasaran yang biasanya dilakukan para petani. Salah satunya Desa Sambirata Kecamatan Cilongok, dimana penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

“Petani Muda” merupakan kelompok tani ini didirikan atas prakarsa para pemuda karang taruna khususnya Grumbul Karang Gondang desa Sambirata, yang berinisiatif untuk membuat kelompok tani yang merupakan implementasi dari salah satu program kerja karang taruna yaitu pada bidang Pertanian. Anggota dalam kelompok Petani Muda tercatat yang aktif pada saat itu adalah 30 Orang, namun seiring berjalannya waktu ditahun 2022 meningkat menjadi 240 orang yang terdiri dari laki- laki dan perempuan dari kisaran umur 18-60 tahun.

Khusus di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas untuk mengambil langkah strategis bagi tercapainya peluang kerja dan optimalisasi potensi wilayah dan tenaga SDM maka pemerintah desa berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, hal ini penting dilakukan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tertuang dalam Pasal 1 ayat 12, Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017-2019, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat, dan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Awalnya harga buah kapulaga dipermainkan oleh tengkulak sehingga menimbulkan keprihatinan para petani kapulaga Desa Sambirata. Berikut data harga dan hasil produksi sebelum adanya PT. Sidomuncul masuk sebagai mitra Desa Sambirata Kecamatan Cilongok dilihat dari tahun 2016.

Tabel I. Harga dan Hasil Produksi Budidaya Kapulaga di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2019.

Tahun	Harga Produksi Kapulaga Per Tahun		Hasil Produksi Kapulaga Per Tahun	
	Kapulaga Basah		Kapulaga Basah	
	Satuan	Harga	Satuan	Harga
2016	1 kg	8.000	73 kwintal	58.400.000
2017	1 kg	9.000	78 kwintal	70.200.000
2018	1 kg	12.000	82 kwintal	98.400.000
2019	1 kg	27.000	91 kwintal	245.700.000

Sumber : Data Tengkulak Kapulaga Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 2022.

Dari data diatas menunjukkan harga kapulaga masih rendah dari tahun 2016 yaitu Rp.8.000/Kg. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat khususnya karang taruna Desa Sambirata. Upaya yang paling menonjol adalah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perhutani) dan pihak swasta (PT.Sidomuncul).

Kurun waktu dua tahun kerjasama tersebut menghasilkan produksi kapulaga yang cukup signifikan. Dari budidaya kapulaga tersebut tercatat harga yang dipasarkan per kilogram, tercantum dalam tabel kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 2. Harga Produksi Budidaya Kapulaga di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2022.

Tahun	Harga Produksi Kapulaga Per Tahun			
	Basah		Kering	
	Satuan	Harga	Satuan	Harga
2020	1 kg	32.000	1 kg	240.000
2021	1 kg	17.000	1 kg	125.000
2022	1 kg	14.000	1 kg	102.000

Sumber : Data Kelompok Tani Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 2022

Dari keterangan tabel diatas, menunjukkan harga per kilogram kapulaga di setiap tahunnya mengalami penurunan. Di tahun 2020 harga kapulaga cukup menjanjikan di angka Rp.32.000/kg, di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.17.000/kg, di tahun 2022 terus mengalami penurunan hingga mencapai harga Rp.14.000/kg sampai saat ini untuk harga kapulaga basah. Di tahun 2020 harga kapulaga kering sampai mencapai angka Rp.240.000/kg, di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.125.000/kg, di tahun 2022 nominal angka kapulaga mencapai Rp.102.000/kg. Nominal angka per tahun penghasilan dari kapulaga tercantum dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Produksi Budidaya Kapulaga di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2022

Tahun	Hasil Produksi Kapulaga Per Tahun			
	Basah		Kering	
	Satuan	Harga	Satuan	Harga
2020	98 kw	313.600.000	14 kw	336.000.000
2021	112 kw	190.400.000	16 kw	200.000.000
2022	188.4 kw	235.200.000	26.89 kw	263.760.000

Sumber : Data Kelompok Tani Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 2022

Dari sumber pertanian, petani kapulaga di tahun 2020 mencapai angka 98 kwintal dengan harga Rp. 313.600.000 per tahun.. Di tahun 2021 mengalami peningkatan kapulaga berkisar 112 kwintal dengan harga 190.400.000 per tahun. Di tahun 2022 hasil kapulaga terus mengalami peningkatan mencapai 188.4 kwintal dengan harga Rp. 235.200.000 untuk kapulaga basah. Kapulaga kering dalam satu tahun di tahun 2020 menghasilkan 14 kwintal dengan harga Rp.336.000.000. Di tahun 2021 kapulaga kering mencapai 16 kwintal dengan harga Rp. 200.000.000. Di tahun 2022 kapulaga kering, berproduksi menghasilkan 26.89 kwintal, dengan kisaran harga Rp.263.760.000.

Mengacu data diatas, hasil produksi kapulaga semakin meningkat namun harga penjualan justru semakin menurun. Ini menjadi permasalahan utama bagi masyarakat khususnya petani kapulaga di Desa Sambirata Kecamatan Cilongok. Hal ini juga disebabkan PT. Sidomuncul hanya membeli buah kapulaga yang kualifikasinya bagus, dan diproduksi

kering. Mengenai residu kapulaga masih belum dikelola dengan baik dan serius, sedangkan residu tersebut masih memiliki nilai ekonomis, dan masih bisa dipasarkan atau dijadikan jamu lokal sebagai unggulan desa tersebut.

Dalam upaya mengoptimalkan pemasaran budidaya kapulaga perlu campur tangan desa tersebut (Badan Usaha Milik Desa) sebagai wadah dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun realita di lapangan Badan Usaha Milik Desa belum bisa menjadi instansi ekonomi dalam hal permodalan dan pemasaran, selain itu belum bisa menggandeng instansi lain untuk membantu meningkatkan jual beli kapulaga, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sambirata melalui budidaya kapulaga lebih berkembang .

Dari permasalahan tersebut maka menarik untuk diteliti secara lebih lanjut mengenai “Collaborative Governance di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Kapulaga).

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah Collaborative Governance di Desa Sambirata Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (studi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya kapulaga). Berdasarkan fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku serta penekanan pada aspek subyektif yang dapat diamati dari subyek– subyek itu sendiri (Sugiyono, 2008:11). Lokasi penelitian ini adalah Desa Sambirata tepatnya di Dusun Karang Gondang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan informan penelitian (a) Penyuluh PT.Sidomuncul, (b) Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, (c) Dinas Perhutani Kabupaten Banyumas, (d) Kepala Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, (e) Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, (f) Kelompok Tani Desa Sambirata Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, (g) Karang Taruna Desa Sambirata Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Teknik pemilihan

informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan purposive sampling dan apabila informan masih belum menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan teknik Snowball sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, terdiri dari 3 (tiga) metode, diantaranya adalah pengamatan (observasi), wawancara mendalam (In-depth Interview), dan dokumentasi yang disesuaikan dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu : (a) informan, (b) tempat dan peristiwa, (c) dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (Miles and Huberman dalam Saldana 2014: 12-14). Sementara dalam rangka mewujudkan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi data dalam pemeriksaan keabsahan data, diantaranya : (a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan (e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif Desa Sambirata termasuk di dalam wilayah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Desa Sambirata terletak di lereng Gunung Slamet bagian barat daya. Berdasarkan data BPS Kecamatan Cilongok dalam angka 2022 Jarak dari pusat Kecamatan Cilongok sekitar ± 4 km , sedangkan dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak ± 16 km .

Wilayah Desa Sambirata sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, dan Bagian Barat berbatasan dengan Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok. Posisi geografisnya terletak -7,3719 pada Koordinat Bujur

dan 109,13577 pada Koordinat Lintang. Berdasarkan data Bulan Juni Tahun 2022, Luas Wilayah Desa Sambirata kurang lebih sebesar 1.602,9 Ha melingkupi permukiman, perkebunan, persawahan dan kehutanan.

Wilayah Desa Sambirata mempunyai ketinggian 433,8 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata harian 32° C. Desa Sambirata memiliki kondisi iklim yang tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan. Curah Hujan di Desa Sambirata tercatat 2000 – 3000 mm/th dengan tingkat kelembapan 26° C.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perekonomian daerah tetangga, atau terpencil dan merupakan salah satu penyanggah perekonomian melalui sektor rempah kapulaga di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Hal ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan juga memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1140). Bahwasanya daerah tertinggal perlu diperhatikan salah satunya dalam lingkup pemberdayaan ekonomi masyarakat.

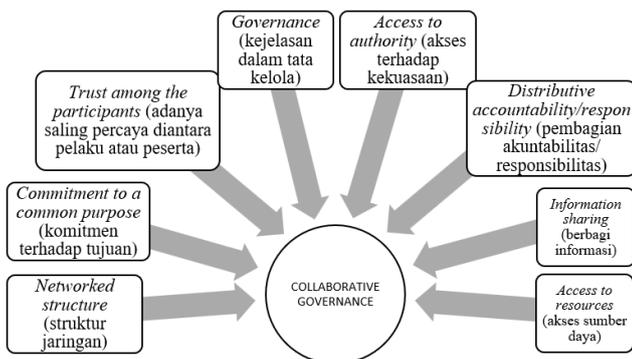
Pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai salah satu upaya untuk memperluas dan mempercepat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui koordinasi berbagai program, kebijakan dan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga efektivitasnya memiliki signifikansi yang besar dalam penanggulangan kemiskinan (Arfianto & Balahmar, 2014:37) dalam Zulkarnain.

Desa Sambirata merupakan salah satu desa terpencil dan tertinggal di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ditinjau dari Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk memberdayakan

masyarakat Desa Sambirata salah satunya dalam bidang ekonomi.

Melihat potensi yang ada, sumber daya alam yang melimpah khususnya pada rempah kapulaga, dan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Desa Sambirata berupaya dalam pengembangan perekonomian di Desa Sambirata, dengan menjalin kolaborasi/kerjasama antara kelompok tani dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta. Edward DeSeve (dalam Putri Fatimah, 2019:15) mengemukakan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran atau indikator keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance. Gambar 1 merangkum indikator keberhasilan kolaborasi. Subbab ini adalah penjelasan lebih detail mengenai gambar tersebut.

Gambar 1. The Design of Collaboration Governance



Sumber: Edward Deseve (2007)

Jaringan

Merujuk pada Schmitt dalam Asri (2022 : 79), yang memaparkan bahwa jaringan tersusun atas sejumlah aktor atau node (individu atau organisasi) dan hubungan sosial atau ikatan (ties) yang menghubungkan individu yang satu dengan yang lainnya. Jaringan, secara konseptual terkait antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang saling terikat secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani (Edward DeSeve dalam Putri Fatimah, 2019:15).

Jaringan kerjasama (kolaborasi) antar para stakeholder dengan kelompok tani Desa Sambirata satu sama lain berhubungan dan ada keterkaitan, walaupun ada yang sering berhubungan juga ada yang tidak sering berhubungan. Baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dikatakan komunikasi

dalam menjalin kolaborasi antara pihak pemerintah dalam hal ini (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan Dinas Perhutani Kabupaten Banyumas) dan pihak swasta (PT. Sidomuncul) dengan kelompok tani Desa Sambirata masih kurang. Dilihat dari proses kerjasama (kolaborasi) berawal dari masuknya PT.Sidomuncul untuk bermitra pemasok bahan baku dengan Desa Sambirata. Menjadikan instansi lain juga menjalin hubungan dengan Desa Sambirata khususnya. Selain itu bentuk dan sinergitas dari kolaborasi antara para stakeholder dengan Kelompok Tani adalah berawal dari relasi atau jaringan. Melihat keadaan di lapangan bentuk dan sinergitas yang terjalin di Desa Sambirata sudah cukup baik dibuktikan dengan Adanya hubungan yang saling membutuhkan sama lain untuk saling melengkapi antara para stakeholder dengan kelompok tani. Sehingga bahu membahu untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sambirata ke arah yang lebih baik.

Aspek Komitmen

Setiap kolaborasi yang terjadi antarindividu atau institusi dapat membantu para pihak yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan dan kesepahaman antara kelompok tani dengan para stakeholder maka bisa ditinjau dari jenis komitmen.

Komitmen menurut Robbin & Judge (2008:101) ada 3 :

1. Komitmen afektif (affective commitment): perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
2. Komitmen normatif (normative commitment): kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.
3. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment): nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan kerjasama (kolaborasi) di Desa Sambirata adalah untuk meningkatkan produktifitas dan memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya Desa Sambirata melalui sektor pertanian kapulaga. Maka dari ketiga komitmen diatas kelompok tani Desa Sambirata berusaha merealisasikannya baik di dalam kelompok

tani sendiri maupun dengan pihak luar yaitu pihak pemerintah (Pemerintah Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhutani) dan pihak swasta (PT.Sidomuncul Tbk). Komitmen kerjasama (kolaborasi) antar para stakeholder dengan kelompok tani Desa Sambirata sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan berjalannya kolaborasi ini dari tahun 2019 hingga saat ini baik dengan pihak pemerintah ataupun pihak swasta.

Aspek Kepercayaan

Proses kolaboratif dapat dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam kolaborasi dan pemahaman bersama. Membangun kepercayaan Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi (Ansell dan Gash (2008 : 543–571).

Mengacu dalam teori diatas, kondisi di lapangan rasa saling percaya antar anggota kelompok tani masih cukup tinggi untuk terus membudidayakan kapulaga, disamping menjadi pekerjaan sehari-hari petani. Perwujudan dari kekompakan tim (Team Building) adalah dengan adanya kunjungan, pendampingan serta penyuluhan oleh pihak/instansi pemerintah, maupun dari pihak swasta. Dilakukannya pertemuan rutin dari anggota internal kelompok tani untuk menguatkan kembali solidaritas antar anggota. Profesionalitas dari kelompok tani sendiri tidak ada keahlian khusus namun berasal dari niat dan semangat sungguh-sungguh dalam membudidayakan pertanian kapulaga. Kemudian didalam membudidayakan kapulaga tidak ada batas waktu (fleksibel) dalam menentukan hasil panen dan proses pembudidayaannya. Bisa dilakukan kapan saja dalam waktu senggang.

Aspek Tata Kelola

Menurut Teori Edward De Save dalam Aspek Tata Kelola (governance) terdapat (Rules) adanya aturan-aturan yang mengikat dalam proses Collaborative Governance di Desa Sambirata. Sedangkan dilihat dari hasil penelitian dilapangan aspek tata kelola mengenai aturan masih belum semua pihak membuat peraturan dalam menjalin kerjasama (kolaborasi). Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk tata kelola dalam bekerjasama

(kolaborasi) dengan para stakeholder masih bebas dan belum teratur.

Pada Teori Edward De Save juga mengemukakan pada Aspek Tata Kelola yaitu Boundary dan exclusivity menegaskan siapa yang termasuk anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan atau kolaborasi dan Self determination yaitu kebebasan dalam penentuan network atau kolaborasi yang akan dilaksanakan/dijalankan dan siapa yang terlibat dalam menjalankannya. Pada hasil penelitian diatas yaitu semua pihak terdapat kebebasan dalam bekerjasama dengan kelompok tani Desa Sambirata, namun dengan pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya kapulaga.

Pada point Network management dalam Aspek Tata Kelola pada Teori Edward De Save menjelaskan bahwa berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dilapangan bahwasanya dengan kerjasama yang dilakukan di Desa Sambirata antara Kelompok tani dengan para stakeholder sudah jelas untuk peran, kontribusi serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya kapulaga.

Aspek Acces to Authority

Dalam teori yang dikemukakan oleh Edward De Save mengenai akses terhadap otoritas (acces to authority) bahwa adanya standar dan prosedur yang jelas yang merupakan salah satu wujud kewenangan yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Pada hasil penelitian diatas belum terdapat perjanjian kerjasama dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan bisa dikatakan belum jelas dalam menjalankan kewenangan hanya berlandaskan pada MOU/MOA. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat desain proses dalam melakukan kerjasama yang tertuang dalam landasan hukum yang mengikat diantara kelompok tani dengan PT.Sidomuncul maupun kelompok tani dengan Dinas Perhutani Kabupaten Banyumas tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Aspek Distributive Accountability/Responsibility

Edward De Save mengemukakan mengenai aspek distributive accountability/ responbility merupakan adanya aturan dalam penataan dan pengelolaan manajemen serta berbagi dalam pembuatan kesepakatan dengan jaringan yang

terlibat. Dalam hal tersebut dapat dikatakan penataan dan pembagian tanggung jawab antar kelompok tani dengan para stakeholder sudah jelas.

Aspek Information Sharing (Berbagi Informasi)

Information sharing (berbagi informasi) yaitu memberikan kemudahan kepada anggota dalam mengakses perlindungan privacy mengenai kerahasiaan identitas pribadi seseorang serta adanya keterbatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak (Edward De Save). Dilihat dari hasil penelitian yaitu antara para stakeholder ataupun didalam internal kelompok tani tetap melakukan komunikasi, dan berbagi informasi baik secara langsung dan tidak langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Information sharing (berbagi informasi) berjalan baik dan lancar.

Aspek Acces to Resources

Access to resources (akses sumber daya) yaitu adanya penyediaan dalam SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan jaringan. Akses sumber daya erupakan komponen yang paling penting dalam pelaksanaan kerjasama /kolaborasi. Fakta dilapangan ditemukan beberapa hasil mengenai diantaranya *Acces To Resources*.

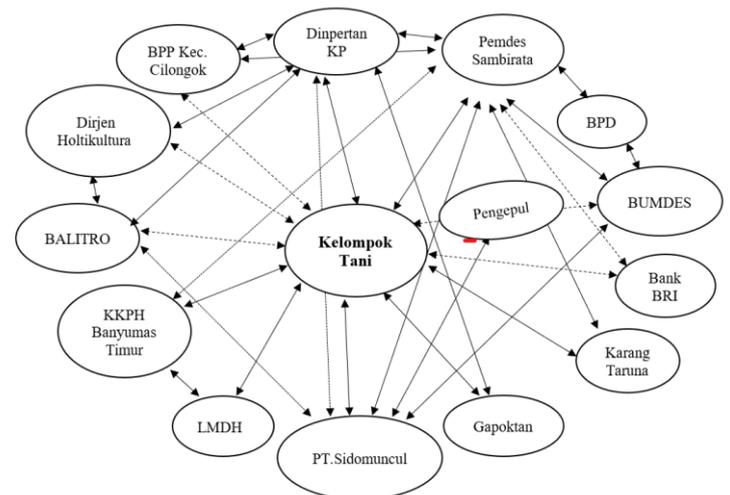
Jumlah anggota Kelompok Tani 30 anggota inti dan 240 anggota kelompok tani secara keseluruhan. Dengan berlatar belakang pendidikan terakhir rata-rata SD, SMP, dan beberapa lulusan SMA/SMK. Pada Teori Edward De Save mengemukakan terkait aspek Acces to Resources yaitu adanya penyediaan dalam SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan jaringan. Namun dilihat dari hasil penelitian dilapangan dari segi kemampuan anggota kelompok tani sendiri masih dikatakan kurang dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian mayoritas berpendidikan terakhir SD, dan belum mengetahui tugas dan fungsi pokok yang sedang diembannya selain itu masih menunggu perintah dari pimpinannya.

Selain dalam Teori Edward De Save mengemukakan terkait aspek Acces to Resources yaitu SDM, juga mengenai keuangan. Adanya anggaran yang berasal dari internal maupun eksternal guna menunjang pembudidayaan kapulaga dan mencapai tujuan dan sasaran. Jika dilihat dari hasil penelitian mengenai Collaborative Governance di Desa Sambirata diperoleh kesimpulan bahwa Dana diperoleh dari Kas RW yaitu sebesar 5.000, kemudian Dana sumbangan berasal dari Bank BRI

yaitu 25.000.000 dan bantuan Rumah Pengering dari PT.Sidomuncul sebesar 30.000.000, Dan ada bantuan dana untuk penyuluhan dan pelatihan dari Pemerintah Desa sebesar 60.000.000.

Di dalam Teori Edward De Save juga menjelaskan terkait aspek Acces to Resources yaitu mengenai sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses kerjasama (kolaborasi). Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan bahwa terdapat bantuan sarana mesin pengering dari PT.Sidomuncul 2 buah, Pemerintah desa memfasilitasi aula untuk dijadikan tempat untuk pelatihan dan penyuluhan. Kemudian untuk prasarana yang digunakan selain aula, petani muda juga melakukan pertemuan di sekretariat pemuda karang gondang. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis merangkum bagan rantai kolaborasi yang terjalin di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

Gambar 2. Rantai Kolaborasi di Desa Sambirata



Sumber: Hasil analisis penulis, 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (studi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya kapulaga), belum maksimal dari segi jaringan masih perlu ditingkatkan kembali guna menjalin relasi dan kerjasama demi mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih berkembang. Namun sejauh ini ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Swasta (PT.Sidomuncul) sudah cukup

baik untuk membantu dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik dari segi peningkatan kapasitas SDM, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana. Peranan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam penyaluran bantuan pupuk gratis untuk petani kapulaga dan DOM sudah terlaksana, serta beberapa bantuan dari PT.Sidomuncul dan Pihak Bank BRI yang memberikan bantuan alat pengering kapulaga, kemudian kurangnya pupuk yang di bagikan serta masih banyaknya masyarakat yang masih kurang akan SDM dalam mengelola budidaya kapulaga. Dari segi komitmen masyarakat sudah baik dalam mengembangkan budidaya kapulaga walaupun dengan harga yang tidak stabil,dibuktikan dengan anggota kelompok tani yang awalnya hanya 30 orang sekarang menjadi 240 orang.

REFERENCES

- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory JPART*
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Astuti, Retno Sunu, Warsono & Abd,Rachi. 2020. Collaborative Governance Perspektif dalam Administrasi Publik. Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network power in collaborative planning. *Journal of Planning Education and Research*, 21(3), 221–236. <https://doi.org/10.1177/0739456X0202100301>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Darman, Arsyad. 2007. (http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/wpccontent/uploads/1017/11/prosiding-1007-13_darman-m-arsyad.pdf). diakses, 4 Juli 2022.
- Dwiyanto, A. (2018). Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, Mencari Identitas. Gadjah Mada University Press
- Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina & Balogh, Stephen, 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory (JPART)*, 11, pp. 1-19.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatimah, Putri. 2021. Collaborative Governance dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sumber. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Makassar. Diakses pada 4 Juli 2022
- Fayol, Henry. (1930). *General and Industrial Management*. Martino Fine Books.
- Hanberger, A. (2004). Democratic Governance and Evaluation. Sixth EES (European Evaluation Society) Conference.
- Irawan, Denny. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 1303-341X . Vol 5, No 3. pp 5-6
- Islamy H, Syaiful, La Ode. 2018. Collaborative governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Minarni, Endang Warih, dkk. 2017. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 1 No. 1.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nopriyono. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina

- Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo), Volume 1 No 1, 21-36
- Novita, Asti Amelia. 2018. Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) JIAP Vol 4, No1*, pp 17-35.
- Nur, Rahmad. 2020. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Diakses 10 Juli 2022
- Nurhidayah. 2018. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Terpadu di Joglo Tani. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 2, no. 1 (2018)*, hal. 135-156. Diakses 11 Juli 2022.
- Page, S. B., Stone, M. M., Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2015). Public Value Creation by Cross-Sector Collaborations: A Framework and Challenges of Assessment. *Public Administration*, 93(3), 715–732. <https://doi.org/10.1111/padm.12161>
- Peraturan Bupati Banyumas No. 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2017 Tentang Road Map I Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017-2019.
- Ratner, B. D. (2012). Collaborative Governance Assessment. CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems and the CGIAR Research Program on Policies.
- Rauf, Ummy. 2010. Fungsi Kelompok Tani. Sumber (https://www.academia.edu/10185007/Fungsi_Kelompok_Tani). Diakses pada 19 Agustus 2022
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 654–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Sari, Suci Kurnia, Afrizal & Indraddin. 2019. Keberhasilan Pkbi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Perilaku Sehat Kolektif Pada Program Sanitasi Total 105 Berbasis Masyarakat (Stbm) (Suatu Studi Pemberdayaan Komunitas). *JISPO VOL. 9 No. 1*.
- Sembiring, Rosali. 2020. Rantai Pasok Pemasaran Produk Kelompok Tani Di Era Pandemic Covid-19. <https://www.neliti.com/ms/publications/372577/rantai-pasok-pemasaran-produk-kelompok-tani-diera-pandemic-covid-19> .
- Setiawati. 2020. Collaborative Governance Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam meningkatkan Hasil Produktivitas Kakao di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Diakses 10 Juli 2022
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: IKAPI.
- Sulistiawati, Asri. 2014. Analisis jaringan sosial dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) tani berkah. *Sumber Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Institut Pertanian Bogor. ISSN 2302 - 7517, Vol. 02, No. 02. pp 9-10
- Suradisastira, K. 2008. Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. forum penelitian agro ekonomi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Suratmodjo, Arwan. C. 2018. Pemilihan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program corporate social responbility. Sumber. *Jurnal ilmiah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya*. ISSN 1412 - 6869, Vol. 17, No. 01. pp 13-19
- Torfinng, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Management Review*, 21(1), 1-11.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wibawa, Samodra dan Nur'aini, Darulfa Aziza. (2020). Collaborative Governance In Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework . Jilid 01 Nomor 1 pp. 35-42
- Zulkarnain, Irwan, dkk. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Cikolelet Melalui Kelompok Tani Mekar Bakti 1. Vol. 15, No. 1, pp. 37-50

